

ILMU, ILMUWAN DAN NEGARA (ANALISIS FILSAFAT ILMU TERHADAP ETIKA DAN KEKUASAAN)

Arya Dekhan¹, Muhammad Takbir², Agus Masykur³

¹⁻³Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, Indonesia.

Corresponding Author: adekhan.73@gmail.com

Informasi Artikel

Kata kunci:

Ilmu;
Ilmuwan;
Negara;
Filsafat.

Publisher

Saoraja Hadis Institute
Al-Musnad

Copyright and License

Copyright © 2025 Arya Dekhan,
Muhammad Takbir, dan Agus
Masykur

*This article is an open-access
article distributed under the
terms and conditions of the
Creative Commons Attribution
4.0 International License.*

Abstrak

Artikel ini mengkaji relasi dialektis antara ilmu, ilmuwan, dan negara melalui perspektif filsafat ilmu dengan menyoroti dimensi etika dan kekuasaan. Penelitian berbasis studi kepustakaan ini bertujuan menyingkap bagaimana ilmu tidak sekadar sistem pengetahuan, tetapi juga instrumen kritis dalam menilai kebijakan negara. Penelitian ini menggunakan metode kepustakaan dan pendekatan kualitatif deskriptif, yang diharapkan mampu memberi pemaknaan serta penjelasan yang mudah dipahami. Ilmuwan dipandang sebagai agen pembentuk peradaban yang memikul tanggung jawab etis untuk memastikan pengetahuan digunakan demi kemaslahatan, bukan sekadar kepentingan politik. Negara, di sisi lain, memiliki otoritas untuk mengatur perkembangan ilmu, yang sering kali melahirkan ketegangan antara objektivitas sains dan legitimasi kekuasaan. Sorotan dalam pembangunan Ibu Kota Nusantara menjadi contoh nyata bagaimana klaim “kota hijau” bersinggungan dengan kritik ekologis para ilmuwan. Kajian ini menegaskan pentingnya etika keilmuan, keberanian intelektual, dan dialog kritis dalam menjaga agar ilmu tetap menjadi sarana pembebasan, bukan alat dominasi. Dengan demikian, kualitas ilmuwan dan sikap negara terhadap ilmu menentukan arah kemajuan peradaban.

Pendahuluan

Kemajuan zaman telah mengantarkan umat manusia pada peradaban yang maju seperti yang kita saksikan dewasa ini. Prinsip *Sapere Aude* (berani berpikir secara mandiri) yang menjadi pedoman hidup manusia modern berhasil membebaskan manusia dari berbagai keterbatasan yang sebelumnya mengekang kebebasan akal pikiran mereka.¹ Ilmu sejak awal peradaban telah menjadi sarana fundamental bagi manusia untuk memahami realitas dan membangun kebudayaan. Dalam tradisi filsafat Yunani, Plato menempatkan ilmu

¹ Franz Magnis-Suseno, *Filsafat sebagai Ilmu Kritis*, Yogyakarta: Kanisius, 1992, h. 88.

sebagai jalan menuju kebenaran universal yang abadi, sementara Aristoteles menekankan pentingnya logika dan observasi empiris dalam menyingkap hakikat alam.²

Paradigma baru muncul dengan menyadari bahwa manusia berada di pusat segala pemikiran, yang mana keyakinan akan masa depan yang bright semakin diperkuat oleh pesatnya kemajuan di berbagai ranah keilmuan, utamanya dalam bidang ilmu pengetahuan alam dan perkembangan teknologi. Manusia memperoleh kedudukan yang berbeda dalam ranah pemikiran kontemporer, yang menempatkan manusia sebagai inti dari eksplorasi filosofis di era modern.³ Sebagai contoh, Rene Descartes, yang dikenal sebagai pelopor filsafat modern, melalui penyelidikan filosofisnya berhasil mengungkap subjektivitas manusia. Hal ini menjadi fondasi bagi peradaban yang memosisikan manusia sebagai subjek mandiri dalam menginterpretasikan dan memberikan makna melalui kemampuan rasionalitas.

Ilmuwan sebagai agen pengembang ilmu memiliki peran strategis dalam membentuk peradaban. Mereka tidak hanya dituntut untuk mencari kebenaran, tetapi juga mengemban tanggung jawab etis dalam mengarahkan penggunaan ilmu agar tidak disalahgunakan.⁴ Dalam konteks modern, ilmuwan sering kali berhadapan dengan tarik-menarik antara kepentingan etika dan kekuasaan politik. Charles Swinburne, seorang sastrawan, menuliskan; "Kemuliaan kepada manusia di tempat yang tinggi! Karena manusia adalah pemimpin atas segalanya". Ungkapan yang berbobot ini menyimpulkan inti dari paham humanisme yang menjadi roh penggerak era modern.

Negara sebagai institusi politik memiliki kekuasaan untuk mengatur, mengarahkan, bahkan membatasi perkembangan ilmu pengetahuan. Magnis-Suseno menjelaskan bahwa negara modern harus mampu menjamin ilmu berfungsi demi kesejahteraan masyarakat, bukan sekadar sebagai alat legitimasi kekuasaan.⁵ Kemajuan yang dialami terbentuk dari kesadaran manusia akan dirinya sendiri, dimana manusia kembali melahirkan kebudayaan Yunani dan Romawi kuno yang kaya akan nilai-nilai humanisme sehingga memunculkan perkembangan dalam ilmu, ilmuwan maupun kenegaraan.

Dengan demikian, kajian hubungan antara ilmu, ilmuwan, dan negara dalam kerangka filsafat ilmu menjadi penting. Analisis terhadap etika dan kekuasaan bukan hanya relevan secara teoritis, tetapi juga krusial dalam menjawab tantangan kontemporer, seperti politisasi ilmu, manipulasi informasi di era digital, dan dilema moral ilmuwan dalam menghadapi kekuatan negara.

Kebanyakan penelitian sebelumnya berfokus pada kajian filsafat ilmu dalam dimensi epistemologis maupun etika penelitian. Namun, hubungan dialektika antara ilmuwan dan negara, khususnya dalam konteks praktik politik serta perumusan kebijakan publik, masih relatif kurang mendapatkan perhatian dalam analisis filosofis. Artikel ini berupaya mengisi pemahaman tersebut dengan menelaah relasi antara ilmu, ilmuwan, dan negara melalui perspektif filsafat ilmu, sekaligus mengkaji implikasinya terhadap etika dan dinamika kekuasaan.

Metodologi Penelitian

Penelitian ini termasuk dalam kategori studi kepustakaan (*library research*), yaitu jenis penelitian yang menjadikan berbagai sumber literatur sebagai bahan utama dalam pengumpulan dan analisis data. Literatur yang dipilih dalam kajian ini mengacu pada tiga kriteria utama, yakni relevansi langsung dengan tema filsafat ilmu, etika, dan negara, keseimbangan antara sumber klasik dan kontemporer, serta keterkaitan dengan kasus

² Plato, *The Republic*, terj. H.D.P. Lee, Harmondsworth: Penguin Classics, 2007, h. 220.

³ Franz Magnis-Suseno, *Etika Dasar: Masalah-Masalah Pokok Filsafat Moral*, Jakarta: Kanisius, 2016, h. 77.

⁴ Jujun S. Suriasumantri, *Ilmu dalam Perspektif: Sebuah Kumpulan Karangan tentang Hakikat Ilmu*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2009, h. 115.

⁵ Franz Magnis-Suseno, *Etika Politik: Prinsip-Prinsip Moral Dasar Kenegaraan Modern*, Jakarta: Gramedia, 2003, h. 102.

praktis hubungan antara riset, ilmuwan, dan kebijakan publik. Pemilihan literatur juga memperhatikan keberagaman perspektif, baik Barat maupun konteks Indonesia Fokus kajian ini terletak pada analisis filsafat ilmu, sehingga seluruh data yang digunakan diperoleh dari telaah terhadap referensi-referensi yang relevan, baik klasik maupun kontemporer. Pendekatan yang digunakan bersifat kualitatif, di mana data dianalisis secara deskriptif melalui uraian naratif yang disusun dalam bentuk teks, bukan dalam bentuk angka atau statistik. Sumber data utama dalam penelitian ini meliputi buku-buku filsafat dan ketatanegaraan, literatur, artikel jurnal ilmiah, serta karya akademik lain yang mendukung pembahasan secara komprehensif.

Hasil dan Penelitian

A. Keagamaan Defenisi Ilmu, Ilmuwan dan Negara

Kata “ilmu” bersumber dari bahasa Arab, yaitu *‘Ilmun*, yang bermakna pengetahuan dan merupakan antonim dari *jahlun* yang berarti kebodohan atau ketidakpahaman. Istilah ilmu umumnya dipadankan dengan beberapa kata Arab lainnya, seperti *ma’rifah* (pengetahuan), *fiqh* (pemahaman), *hikmah* (kebijaksanaan), dan *syu’ur* (perasaan).⁶

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, ilmu diartikan sebagai pengetahuan pada suatu ranah yang diatur secara sistematis mengikuti metodologi tertentu yang berfungsi untuk menguraikan berbagai gejala yang ada dalam bidang pengetahuan itu.⁷

The Liang Gie mengemukakan bahwa ilmu merupakan serangkaian kegiatan kajian yang berupaya mencari penjelasan melalui suatu metode untuk memperoleh pemahaman secara logis dan empiris tentang dunia ini,⁸ baik dari berbagai aspek maupun secara menyeluruh, serta keseluruhan pengetahuan yang terstruktur untuk menjelaskan berbagai fenomena yang hendak dipahami manusia. Ilmu harus diupayakan melalui aktivitas manusia, aktivitas tersebut harus dilakukan dengan pendekatan tertentu, dan pada akhirnya aktivitas yang metodis itu menghasilkan pengetahuan yang sistematis.

Dalam istilah Inggris, ilmu diistilahkan sebagai *science* yang memiliki makna “*the study of the structure and behaviour of the physical and natural world and society, especially through observation and experiment*” (kajian tentang struktur dan tingkah laku dari alam fisik dan alamiah serta masyarakat, khususnya melalui observasi dan eksperimen).⁹

Kata lmuwan, berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, adalah Ilmuwan adalah orang yang ahli dan berpengetahuan mendalam dalam suatu ranah keilmuan.¹⁰

Merujuk pada pengertian ini, ilmuwan adalah seseorang yang pengetahuannya melampaui pengetahuan rata-rata masyarakat. Kedalaman pengetahuan tersebut dapat dicapai karena seorang ilmuwan konsisten dalam belajar, membaca, meneliti, mereproduksi, dan memajukan ilmu pengetahuan. Komitmen yang tinggi dalam bidang keilmuan yang ditekuninya membuatnya menjadi ahli dengan pemahaman yang komprehensif.

Pada masa Yunani klasik, negara disebut *Polis* yang merupakan sarana hidup bangsa Yunani. *Polis* adalah instansi alamiah yang organik, dipengaruhi hukum alam yakni kehidupan dan kematian. Negara membutuhkan ruang hidup (*lebensraum*) yang berkembang dinamis, dengan wujud fisik berupa negara dan jiwa berupa masyarakat sebagai pembentuknya.¹¹

⁶ Ensiklopedi Islam, Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1993.

⁷ *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (KBBI) Edisi V, Jakarta: Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2016, h. 622.

⁸ The Liang Gie, *Pengantar Filsafat Ilmu*, Yogyakarta: Liberty, 2000, h. 25.

⁹ Oxford University Press, *Oxford English Dictionary*, Oxford: Oxford University Press, 2010, h. 1450.

¹⁰ *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (KBBI), “Ilmuwan,” diakses melalui <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/ilmuwan>

¹¹ Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008, h. 51.

Aristoteles menyatakan bahwa manusia adalah *Zoion politikon* (makhluk yang hidup dalam Polis).¹² Ungkapan Aristoteles ini dalam bahasa modern diterjemahkan sebagai “manusia adalah makhluk sosial”. Terjemahan tersebut memang benar namun maksud Aristoteles sebenarnya lebih luas dari sekadar makhluk sosial. Menurutnya, manusia secara alamiah hidup dalam *Polis*.

Manusia disebut makhluk Polis karena tidak terpisahkan dari kehidupan negara, dimana manusia hidup dalam tatanan aturan negara dan mendapat perlindungannya. Aristoteles memandang negara sebagai komunitas untuk kebaikan bersama, dan dari kajiannya ini mulai berkembang ilmu politik (*political science*) termasuk pembedaan model-model komunitas negara.¹³

Negara memiliki dua makna yaitu sebagai masyarakat/wilayah yang bersatu secara politis, dan sebagai lembaga pusat yang menjamin serta mengatur kesatuan tersebut. Dalam ilmu politik, negara adalah *agency* (alat) masyarakat yang berkuasa mengatur hubungan manusia dan menciptakan gejala kekuasaan dalam masyarakat.¹⁴ Negara menjadi sarana untuk mewujudkan kehidupan yang baik, sehingga dalam pencapaian ini manusia selalu memerlukan sesama untuk berinteraksi satu sama lain.

Dalam menjalankan kekuasaan, hubungan antara etika dan kekuasaan terletak pada bagaimana menjalankannya sesuai dengan prinsip moralitas. Etika berfungsi sebagai landasan normatif yang mengarahkan kekuasaan agar tidak digunakan secara sewenang-wenang, melainkan demi kebaikan bersama. Kekuasaan tanpa etika cenderung melahirkan otoritarianisme dan penyalahgunaan wewenang, sedangkan kekuasaan yang diiringi etika akan mencerminkan keadilan, tanggung jawab, dan penghormatan terhadap martabat manusia.¹⁵

Dengan demikian, etika dan kekuasaan saling berkaitan erat: etika menjadi pedoman normatif, sedangkan kekuasaan menjadi instrumen praktis dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.¹⁶

B. Ciri Ilmu, Sikap Ilmuwan dan Bentuk Negara

Menurut Van Melsen, ilmu memiliki karakteristik khusus yang membedakannya dari bentuk pengetahuan lain. Ilmu ditandai oleh sifat rasional, sistematis, objektif, universal, serta dapat dipertanggungjawabkan secara metodologis.¹⁷ Sebagaimana dikemukakan oleh Jujun S. Suriasumantri dalam bukunya *Filsafat Ilmu: Sebuah Pengantar Populer*,¹⁸ ciri yang menandai ilmu yakni:

1. Ilmu pengetahuan menuntut adanya keterpaduan yang logis dan koheren. Oleh karena itu, setiap penelitian perlu disusun secara sistematis melalui metode tertentu serta diorganisasi dalam kerangka berpikir yang logis.
2. Ilmu pengetahuan pada hakikatnya bersifat tanpa pamrih, sebab keberadaannya selalu terkait dengan tanggung jawab moral seorang ilmuwan.
3. Setiap pengetahuan ilmiah harus bersifat objektif, yakni ditentukan oleh objek penelitian itu sendiri, bukan oleh bias atau pandangan pribadi peneliti.

¹² Aristoteles, *Politics*, terj. Benjamin Jowett, Oxford: Clarendon Press, 1885, h. 28.

¹³ Raimundus Bulet Namang, ‘Negara Dan Warga Negara Perspektif Aristoteles’.

¹⁴ Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008), h. 51.

¹⁵ Franz Magnis-Suseno, *Etika Politik: Prinsip-prinsip Moral Dasar Kenegaraan Modern*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1999, h. 18.

¹⁶ Harold D. Lasswell dan Abraham Kaplan, *Power and Society: A Framework for Political Inquiry*, New Haven: Yale University Press, 1950, h. 75.

¹⁷ Van Melsen, *Ilmu Pengetahuan dalam Filsafat*, Jakarta: Gramedia, 1985, h. 14.

¹⁸ Jujun S. Suriasumantri, *Filsafat Ilmu: Sebuah Pengantar Populer*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2009, h. 45.

4. Pengetahuan ilmiah menuntut adanya verifikasi oleh pihak lain, yang hanya mungkin dilakukan apabila hasil penelitian dapat dipublikasikan dan dipertukarkan.
5. Ilmu menuntut sikap kritis, yakni kesediaan menerima bahwa setiap teori bersifat sementara dan dapat direvisi melalui pengujian data empiris yang lebih mutakhir.
6. Setiap pengetahuan ilmiah harus mampu menjembatani hubungan antara teori dan pelaksanaan praktiknya.

Seorang ilmuwan berkewajiban untuk mengembangkan ilmu pengetahuan, dan dalam melaksanakan kewajiban tersebut ia senantiasa terikat oleh tanggung jawab etis.¹⁹ Tanggung jawab etis ilmuwan adalah mengembangkan ilmu dengan mempertimbangkan kepentingan umum, kodrat manusia, dimensi masa depan, dan nilai universal, sekaligus mengangkat martabat manusia serta memperkuat hubungan antar sesama.

Seorang ilmuwan dituntut memiliki sikap ilmiah yang terbentuk melalui proses pembelajaran, mulai dari identifikasi, pengalaman, hingga penerapan. Proses tersebut memungkinkan perubahan dan pengembangan pengetahuan baru.²⁰ Karena itu, ilmuwan harus berlandaskan etika yang kuat, sebab etika berperan penting dalam interaksi sosial maupun dalam relasi kekuasaan di ranah kenegaraan.

Ilmu pengetahuan yang mengabaikan nilai kemanusiaan berpotensi merusak kehidupan, sehingga setiap produk ilmiah harus memberi manfaat bagi umat manusia, khususnya dalam mendukung penegakan kehidupan bernegara.²¹ Olehnya, etika memiliki peran fundamental dalam tugas seorang ilmuwan, sebab pengembangan ilmu pengetahuan harus dilandasi moralitas yang jelas agar tidak disalahgunakan dan tetap menjunjung nilai kemanusiaan.

Bentuk negara merupakan hal yang berkaitan dengan berbagai kemungkinan susunan yang dapat diwujudkan oleh suatu negara. Meskipun terdapat keragaman bentuk, namun tetap terdapat persamaan mendasar yang tidak mengubah hakikat negara itu sendiri.

Menurut Plato, ada lima macam bentuk negara yakni aristokrasi, timokrasi, oligarki, demokrasi, dan tirani.²² Yaitu:

1. Aristokrasi yaitu pemerintahan oleh Aristokrat (cendekiawan) sesuai dengan pikiran orang lain.
2. Timokrasi yaitu pemerintahan oleh orang-orang yang ingin mencapai kemasyhuran dan kehormatan.
3. Oligarki yaitu pemerintahan oleh para golongan hartawan yang melahirkan milik partikuli.
4. Demokrasi yaitu pemerintahan oleh rakyat miskin.

Tirani yaitu pemerintahan oleh seorang penguasa yang bertindak dengan sewenang-wenang.

C. Urgensi Ilmu, Ilmuwan dan Negara

Ilmu pengetahuan telah menyatu dengan aktivitas manusia sepanjang sejarah, mulai dari masa Yunani Kuno sampai era kontemporer.²³ Kegiatan keilmuan ini berlangsung secara dinamis sesuai dengan konteks sosial budaya yang ada, di mana munculnya fenomena-

¹⁹ Franz Magnis-Suseno, *Etika Dasar: Masalah-masalah Pokok Filsafat Moral*, Yogyakarta: Kanisius, 1999, h. 210.

²⁰ Suriasumantri, Jujun S. *Filsafat Ilmu: Sebuah Pengantar Populer*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2017, h. 89.

²¹ Franz Magnis-Suseno, *Etika Dasar: Masalah-Masalah Pokok Filsafat Moral*, Jakarta: Kanisius, 2016, h. 112.

²² Plato, *The Republic*, terj. H.D.P. Lee, Harmondsworth: Penguin Classics, 2007, h. 220.

²³ Amsal Bakhtiar, *Filsafat Ilmu*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2015, h. 3.

fenomena baru secara bersamaan menuntut respons yang kreatif dan produktif untuk menghadapinya.

Masyarakat dengan perkembangan ilmu yang produktif umumnya mengalami kemajuan dan pertumbuhan yang pesat, sedangkan masyarakat dengan perkembangan ilmu yang lambat cenderung tertinggal. Oleh karena itu, faktor kunci yang menentukan kemajuan ilmu adalah peran ilmuwan itu sendiri.

Seorang ilmuwan tidak dapat bersikap pasif, melainkan harus aktif berpikir, meneliti, dan melakukan berbagai upaya untuk mengembangkan ilmu pengetahuan sesuai bidang keahliannya.²⁴ Berdasarkan hal tersebut, dapat dilihat dalam beberapa aspek berikut :

1. Dialektika antara Ilmuwan dan Negara

Sejarah peradaban manusia, sangat dipengaruhi oleh eksistensi para ilmuwan. Proporsi ilmuwan memang sangat kecil dibanding jumlah populasi secara keseluruhan, namun berkat daya gagasan, konsep, dan pemikirannya yang kuat, justru dapat mengendalikan mayoritas hal dalam system sosial.²⁵ Komunitas ilmuwan inilah yang pada kenyataannya menjadi penggerak utama perjalanan sejarah peradaban manusia.

Sebagai warga negara, seorang ilmuwan memiliki tanggung jawab ganda terhadap negara, yakni tanggung jawab sosial dan etika.²⁶ Secara sosial, ilmuwan harus memastikan produk keilmuannya bermanfaat bagi kemajuan masyarakat di masa depan. Dan secara etika, ilmuwan berkewajiban menjadi contoh bagi masyarakat dalam hal objektivitas, keterbukaan menerima saran maupun masukan dari berbagai pihak.

Selain itu, ilmuwan perlu memiliki keberanian untuk menyampaikan pendapat ketika diperlukan dan berani mengakui kesalahan yang telah dilakukan. Seorang ilmuwan harus mampu menjadi teladan bagi masyarakat melalui kekuatan ilmu pengetahuan yang dikuasainya.²⁷

Setiap ilmuwan memiliki keunikan karakteristik tersendiri, sehingga antara ilmuwan satu dengan lainnya dapat memiliki ciri dan orientasi yang berbeda.²⁸ Walau peran utama mereka berpusat pada bidang keilmuan, namun penggunaan ilmu tersebut dapat disesuaikan dengan kepentingan pribadi ilmuwan, ada yang menggunakannya secara idealis untuk kemajuan ilmu, namun ada juga yang memanfaatkannya untuk tujuan eksistensi diri, ekonomi, budaya, maupun politik.

Ilmu pengetahuan dan kekuasaan merupakan kesatuan yang tidak terpisahkan, di mana sejarah perkembangan ilmu lebih mudah dipahami melalui perspektif kepentingan politik daripada dorongan internal pengembangan ilmu itu sendiri.²⁹ Bahkan ketika dorongan internal menuntut kemajuan lebih lanjut dalam perkembangan ilmu, tuntutan tersebut sulit terwujud tanpa adanya dukungan politik.

Keterlibatan kalangan ilmuwan dalam mendukung kekuasaan sebenarnya adalah hal yang alamiah,³⁰ karena sepanjang sejarah kehidupan sosial politik telah dipenuhi dengan dinamika seperti ini. Selalu muncul perdebatan, dukungan, maupun penolakan terkait partisipasi intelektual dalam panggung politik kekuasaan.

Setiap ilmuwan memiliki keterikatan dengan tanggung jawab profesional dan moral, yang mengharuskannya tidak mudah dipengaruhi oleh berbagai kekuatan seperti politik,

²⁴ Karl R. Popper, *The Logic of Scientific Discovery*, London: Routledge, 2002, h. 16.

²⁵ Lewis Mumford, *The Myth of the Machine: Technics and Human Development*, New York: Harcourt, 1967, h. 78.

²⁶ Jujun S. Suriasumantri, *Ilmu dalam Perspektif: Sebuah Kumpulan Karangan tentang Hakikat Ilmu*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2009, h. 102.

²⁷ Jujun S. Suriasumantri, *Ilmu dalam Perspektif: Sebuah Kumpulan Karangan tentang Hakikat Ilmu*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2009, h. 45.

²⁸ Jujun S. Suriasumantri, *Filsafat Ilmu: Sebuah Pengantar Populer*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2017, h. 134.

²⁹ Amsal Bakhtiar, *Filsafat Ilmu*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2015, h. 142.

³⁰ Jujun S. Suriasumantri, *Ilmu dalam Perspektif: Sebuah Kumpulan Karangan tentang Hakikat Ilmu*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2009, h. 98.

karisma individu tertentu, kelompok, atau golongan dalam bertindak tanpa mempertimbangkan kedua tanggung jawab fundamental tersebut.³¹

Hubungan antara ilmuwan dan politik sering menjadi pembahasan, di mana keduanya memiliki ranah kerja yang berbeda dan hanya berbeda dari aspek fungsional, namun dari segi tanggung jawab moral keduanya tetap harus sama. Ilmuwan, terutama bidang sosial harus mampu secara objektif memberikan penilaian terhadap kondisi sosial sesuai dengan disiplin ilmunya untuk dapat diketengahkan kepada masyarakat.

Seorang ilmuwan dalam kaitan dengan kondisi seperti yang dikemukakan di atas harus memiliki empat pilar menyangkut, *pertama* kebenaran, *kedua* kejujuran, *ketiga* tidak mempunyai kepentingan langsung, dan *keempat* menyandarkan diri pada kekuatan argumentasi untuk menilai kebenaran.³²

Suatu tinjauan dalam pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) sering diklaim pemerintah sebagai proyek “hijau” dan “berkelanjutan”. Namun, sejumlah pakar lingkungan, ekologi, dan ilmuwan kehutanan justru mengajukan kritik keras terhadap klaim tersebut berdasarkan data sains dan lingkungan.

Studi lingkungan dari WALHI, Greenpeace, dan sejumlah akademisi menunjukkan bahwa pembangunan IKN berpotensi menimbulkan deforestasi, kehilangan keanekaragaman hayati, dan risiko krisis air di kawasan yang sebelumnya merupakan ekosistem hutan tropis.³³ Namun, pemerintah tetap menekankan narasi “*green city*” dan “*smart city*” sebagai legitimasi politik pembangunan, meskipun sebagian data ilmiah tidak sepenuhnya mendukung klaim tersebut.

Sebahagian ilmuwan yang mengkritik akibat dari pembangunan IKN mendapat respons negatif, baik berupa marginalisasi pandangan mereka di media maupun tekanan politik secara halus. Hal ini memperlihatkan dilema etis seorang ilmuwan, apakah harus tetap menyuarakan data objektif meskipun berisiko dikonfrontasi dengan kepentingan negara, atau menyesuaikan diri dengan narasi resmi demi keamanan dan penerimaan masyarakat.

Hal ini menunjukkan bahwa ilmu pengetahuan tidak pernah netral sepenuhnya, ia dituntut selalu berinteraksi dengan kekuasaan. Filsafat ilmu membantu menilai bagaimana kebenaran ilmiah sering kali tereduksi oleh kepentingan politik dan ekonomi. Dari sisi etika, hal ini menegaskan perlunya “tanggung jawab sosial ilmuwan” untuk terus menghadirkan data objektif meskipun berhadapan dengan kekuasaan negara.

Dengan menyandarkan diri pada kekuatan argumentasi, ilmuwan mampu menempatkan pengetahuan dalam ruang dialog yang sehat, terbuka, dan dapat diuji secara kritis, sehingga ilmu pengetahuan tetap menjadi instrumen pembebasan dan kemajuan peradaban manusia.

Dalam konteks ini, filsafat ilmu berfungsi tidak hanya untuk menilai validitas epistemologis suatu pengetahuan, tetapi juga sebagai kerangka kritis dalam menguji kebijakan negara.³⁴ Dengan pendekatan filsafat ilmu, dapat dipertanyakan: apakah kebijakan publik benar-benar berlandaskan rasionalitas ilmiah atau sekadar legitimasi politik. Contoh nyata terlihat pada perdebatan kebijakan lingkungan dan pembangunan IKN, di mana klaim ‘kota hijau’ tidak sepenuhnya sejalan dengan data ekologi yang disampaikan para ilmuwan.

2. Pengembangan Ilmuwan dan Negara

Seorang ilmuwan dituntut untuk secara konsisten mendalami bidang keilmuannya, sehingga dapat disebut sebagai ilmuwan sejati yang menempatkan ilmu sebagai sarana untuk

³¹ Amsal Bakhtiar, *Filsafat Ilmu*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2015, h. 94.

³² Jujun S. Suriasumantri, *Filsafat Ilmu: Sebuah Pengantar Populer*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2017, h. 141.

³³ Ardianto Budi Rahmawan and Gabriela Eliana, ‘Mitigating Aquifer Crisis in Indonesia’s New Capital, Nusantara: Problems and Lessons Learned from Singapore’, *Közigazgatási És Infokommunikációs Jogi PhD Tanulmányok*, 4.1 (2023), pp. 5–22, doi:10.47272/kikphd.2023.1.1.

³⁴ Jujun S. Suriasumantri, *Filsafat Ilmu: Sebuah Pengantar Populer*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2009, h. 121.

meneguhkan nilai-nilai luhur kemanusiaan.³⁵ Ia berupaya menempatkan kemanusiaan dalam ruang dialog yang dibangun atas dasar saling pengertian dengan realitas sekitar, sehingga interaksi tersebut berlangsung dalam semangat pembebasan, bukan dominasi.

Miriam Budiardjo dalam bukunya *Dasar-Dasar Ilmu Politik*,³⁶ menyebutkan beberapa langkah agenda dalam kemajuan bernegara yaitu:

- a. Supremasi Hukum, yaitu menegakkan hukum secara adil tanpa pandang bulu sebagai dasar tertib sosial dan politik.
- b. Penguatan Demokrasi, yaitu mendorong partisipasi rakyat dalam pengambilan keputusan serta menjaga kebebasan sipil.
- c. Keadilan Sosial, yaitu memastikan distribusi kesejahteraan yang merata bagi seluruh lapisan masyarakat.
- d. Etika Politik, yaitu mengedepankan moralitas dan integritas dalam kepemimpinan serta pengelolaan negara.
- e. Pembangunan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, yakni dengan memajukan pendidikan, penelitian, dan inovasi sebagai fondasi daya saing bangsa.
- f. Pemberdayaan Masyarakat, yaitu dengan mengoptimalkan potensi lokal untuk meningkatkan kemandirian dan keberlanjutan pembangunan.

Pengembangan ilmuwan dan negara memiliki keterkaitan erat dalam upaya mendorong agenda kemajuan bernegara sebagaimana langkah-langkah aplikatif yang telah disebutkan. Supremasi hukum, penguatan demokrasi, dan keadilan sosial hanya dapat berjalan efektif jika didukung oleh peran aktif ilmuwan dalam menyediakan kajian kritis, inovasi, serta rekomendasi kebijakan yang berbasis pengetahuan.

Ilmuwan dengan kapasitas analitisnya mampu memberi arah agar pembangunan tidak hanya berorientasi pada pertumbuhan ekonomi, tetapi juga memperhatikan keadilan, keberlanjutan, dan nilai-nilai kemanusiaan.³⁷ Olehnya itu, negara tidak hanya berperan sebagai pengelola kekuasaan, tetapi juga sebagai fasilitator yang membuka ruang dialog dengan para ilmuwan demi terciptanya tata kelola yang rasional dan bermartabat.

Negara modern dituntut untuk tidak sekadar memusatkan perhatian pada aspek kekuasaan politik, melainkan juga memainkan peran aktif sebagai fasilitator dalam pengembangan ilmu pengetahuan.³⁸ Hal ini berarti negara perlu menyediakan ruang dialog yang terbuka dengan para ilmuwan, sehingga kebijakan yang dihasilkan tidak hanya berlandaskan pada kepentingan pragmatis, tetapi juga pada dasar pengetahuan yang rasional.

Pada titik inilah filsafat ilmu menjadi relevan, ia bukan sekadar wacana teoretis, melainkan instrumen normatif yang dapat digunakan untuk mengevaluasi apakah negara telah menjalankan fungsi kebijakan secara etis.³⁹ Misalnya, apakah kebijakan riset diarahkan untuk kepentingan publik atau justru tunduk pada kepentingan pragmatis jangka pendek. Dengan perspektif filsafat ilmu, praktik politik dapat diarahkan agar tetap berpijak pada kebenaran ilmiah sekaligus etika publik.

Keterlibatan ilmuwan dalam proses perumusan kebijakan akan memperkuat legitimasi sekaligus meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan, karena kebijakan tersebut lahir dari kombinasi antara pertimbangan etis dan analisis ilmiah.

Lebih jauh, keberadaan negara sebagai fasilitator ilmu pengetahuan juga mencerminkan tanggung jawab moralnya terhadap pembangunan peradaban. Negara yang mampu membangun komunikasi produktif dengan para ilmuwan akan menciptakan tata

³⁵ Amsal Bakhtiar, *Filsafat Ilmu*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2015, h. 120.

³⁶ Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2008, h. 67.

³⁷ Franz Magnis-Suseno, *Etika Politik: Prinsip-Prinsip Moral Dasar Kenegaraan Modern*, Jakarta: Gramedia, 1994, h. 122.

³⁸ Jujun S. Suriasumantri, *Ilmu dalam Perspektif: Sebuah Kumpulan Karangan tentang Hakikat Ilmu*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2009, h. 110.

³⁹ Jujun S. Suriasumantri, *Filsafat Ilmu: Sebuah Pengantar Populer*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2009, h. 133.

kelola yang tidak hanya rasional, tetapi juga bermartabat, sebab kebijakan publiknya diarahkan untuk kemaslahatan rakyat.

Dengan demikian, relasi timbal balik antara ilmuwan dan negara menjadi fondasi strategis dalam menghadapi tantangan global, sekaligus memastikan bahwa kekuasaan tidak terlepas dari nilai etika dan orientasi kemanusiaan.

Kesimpulan dan Saran

Dari uraian di atas dapat diambil sedikit kesimpulan bahwa, ilmu dan ilmuwan merupakan satu kesatuan di mana ilmuwan lahir atas dasar pengetahuan dan keilmuannya dalam memberikan nilai yang benar untuk kehidupan sosial maupun bernegara.

Ilmu berasal dari bahasa Arab yakni *'alima* yang berarti tahu, atau pengetahuan. Adapun ilmuwan merupakan individu yang konsisten dalam melakukan proses penelitian mengenai alam, sosial maupun kemanusiaan berdasarkan ilmiah, etika dan rasional dengan tujuan mendapatkan fakta dan solusi atas suatu permasalahan. Sedangkan negara adalah kumpulan masyarakat yang dibentuk dengan tujuan demi kebaikan bersama, karena manusia senantiasa bertindak untuk mencapai sesuatu yang mereka anggap baik. Maka peran ilmu pengetahuan dan ilmuwanlah yang dapat memberikan jalan, petunjuk kebaikan dalam kehidupan bernegara yang benar.

Hubungan ketiganya kerap diwarnai ketegangan antara etika dan kekuasaan. Ilmu dapat menjadi sarana pembebasan manusia, tetapi juga bisa berubah menjadi instrumen legitimasi kekuasaan jika dilepaskan dari nilai-nilai moral. Oleh karena itu, sinergi antara ilmu, ilmuwan, dan negara harus dibangun di atas dasar etika keilmuan, tanggung jawab sosial, dan orientasi pada kesejahteraan publik.

Diperlukan komitmen etis dalam pengembangan ilmu, termasuk keberanian menjaga nilai akademik dari intervensi politik maupun kepentingan. Negara perlu menciptakan kebijakan riset dan pendidikan yang berbasis etika dan kepentingan publik, bukan sekadar kepentingan politik jangka pendek. Regulasi harus menjamin kebebasan akademik sekaligus memastikan ilmu pengetahuan berkontribusi pada pembangunan bangsa.

Olehnya itu masih perlu penelitian interdisipliner yang mengkaji relasi ilmu, etika, dan kekuasaan baik dalam konteks kontemporer, seperti era digital, globalisasi, dan politik identitas, maupun praktiknya. Sehingga kajian filsafat ilmu tetap relevan dengan dinamika zaman.

Daftar Pustaka

- Aristoteles. *Politics*. Translated by Benjamin Jowett. Oxford: Clarendon Press, 1885.
- . *Politik*. Translated by R. Koesoemohamidjojo. Jakarta: Gramedia, 2007.
- Bakhtiar, Amsal. *Filsafat Ilmu*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2015.
- Budiardjo, Miriam. *Dasar-dasar Ilmu Politik*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2008.
- Descartes, René. *Meditasi-meditasi Metafisika*. Translated by K. Bertens. Jakarta: Gramedia, 2002.
- Ensiklopedi Islam*. Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1993.
- Gie, T. L. *Pengantar Filsafat Ilmu*. Yogyakarta: Liberty, 1991.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Edisi V*. Jakarta: Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2016.
- Lasswell, Harold D., and Abraham Kaplan. *Power and Society: A Framework for Political Inquiry*. New Haven: Yale University Press, 1950.
- Magnis-Suseno, Franz. *Etika Dasar: Masalah-Masalah Pokok Filsafat Moral*. Jakarta: Kanisius, 2016.
- . *Etika Politik: Prinsip-prinsip Moral Dasar Kenegaraan Modern*. Jakarta: Gramedia, 1992.

- . *Filsafat sebagai Ilmu Kritis*. Yogyakarta: Kanisius, 1992.
- Melsen, A. G. M. Van. *Ilmu Pengetahuan dalam Filsafat*. Jakarta: Gramedia, 1985.
- . *Science and Responsibility*. Pittsburgh: Duquesne University Press, 1975.
- Mumford, Lewis. *The Myth of the Machine: Technics and Human Development*. New York: Harcourt, 1967.
- Namang, Raimundus Bulet. “Negara dan Warga Negara Perspektif Aristoteles.” *Oxford English Dictionary*. Oxford: Oxford University Press, 2010.
- Plato. *Republik*. Translated by R. Koesoemohamidjojo. Jakarta: Gramedia, 2006.
- . *The Republic*. Translated by H. D. P. Lee. Harmondsworth: Penguin Classics, 2007.
- Popper, Karl R. *The Logic of Scientific Discovery*. London: Routledge, 2002.
- Rahmawan, A. B., and G. Eliana. “Mitigating Aquifer Crisis in Indonesia’s New Capital, Nusantara: Problems and Lessons Learned from Singapore.” *Közigazgatási És Infokommunikációs Jogi PhD Tanulmányok* 4, no. 1 (2023): 5–22.
- Suriasumantri, Jujun S. *Ilmu dalam Perspektif: Sebuah Kumpulan Karangan tentang Hakikat Ilmu*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2009.
- . *Filsafat Ilmu: Sebuah Pengantar Populer*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2010.
- . *Filsafat Ilmu: Sebuah Pengantar Populer*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2017.